

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah jalan tol dimana infrastruktur jalan tol memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, kesatuan dan persatuan. Tetapi pemerintah tidak dapat melakukan sendiri karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk mengatasinya Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP) dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum. tetapi kerjasama tersebut juga seringkali dapat membawa suatu masalah karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan swasta.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif untuk melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya skema KPBU atau bisa juga disebut PPP dapat memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur di Indonesia khususnya pembangunan jalan tol. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalihan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sedangkan manfaat jalan tol untuk masyarakat antara lain mengurangi waktu tempuh dalam perjalanan dan mempermudah pendistribusian kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kendala yang terjadi antara lain adanya perbedaan persepsi pemerintah dan pihak swasta dalam konsep proyek dan minimnya modal investasi yang tersedia. Dalam hal ini diperlukan kepastian ketentuan kebijakan dan regulasi di bidang investasi dan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak.

Kata kunci : Public Privat Partnership, Kesejahteraan, Pemerintah, Infrastruktur.

ABSTRACT

Infrastructure development is a government obligation as an effort to meet the needs and welfare of the community. One of them is toll road where toll road infrastructure plays a very important role in supporting economic, social, cultural, unity and unity. But the government cannot do it alone because of its limited budget. To overcome this, the Government is required to use several funding alternatives, one of which is a development cooperation scheme involving the private sector, known as Public Private Partnership (PPP), known as Government Cooperation with Business Entities (PPP). PPP in the Provision of Infrastructure aims for the public interest. but such cooperation can also often lead to problems because of different interests between the government and the private sector.

In this study the authors conducted normative juridical research to conduct library research or document studies conducted and aimed at written regulations or other legal materials, which consist of primary legal materials and secondary legal materials. The data obtained were analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques.

Based on the results of the analysis conducted, it can be concluded that with the PPP scheme or also called PPP, it can facilitate the government in implementing infrastructure provision in Indonesia, especially the construction of toll roads. Sufficient funding needs in a sustainable manner in the provision of infrastructure through the mobilization of private funds, realizing the provision of quality, effective, efficient, targeted, and timely infrastructure. While the benefits of toll roads for the community include reducing travel time in travel and facilitating the distribution of economic activities in an area and opening up jobs for the community in the surrounding area. Constraints that occur include the different perceptions of the government and private parties in the project concept and the lack of available investment capital. In this case, certainty of policy and regulatory provisions in the fields of investment and infrastructure development projects is needed so that it can be implemented consistently by all parties.

Keywords: Public Private Partnership, Welfare, Government, Infrastructure